

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 45 DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA
(Studi Kasus Pada Asosiasi DPD REI (Real Estat Indonesia) Jawa Tengah)**

Danisa Milania Hikma
11201218

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng
danishania392@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nirlaba (NPO) sesuai PSAK no. 45. Studi kasus DPD REI Jawa Tengah menunjukkan bahwa banyak NPO masih menggunakan metode akuntansi sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif data primer dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di DPD REI Jawa Tengah, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, rekonstruksi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin dengan triangulasi teknik, waktu, dan sumber. Pada tahun 2020, DPD REI Jawa Tengah mencatat total pendapatan sebesar Rp 1.178.573.359 dan beban Rp 1.406.634.470, mengakibatkan defisit dan penurunan aset bersih. Laporan posisi keuangan menunjukkan total aset Rp 315.367.861 tanpa liabilitas, sementara laporan arus kas menunjukkan penurunan kas sebesar Rp 228.061.111. DPD REI Jawa Tengah masih menggunakan pencatatan kas sederhana dan metode single entry, serta belum sepenuhnya menerapkan PSAK 45. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem informasi akuntansi berbasis accrual dan double entry untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Implikasi manajerial termasuk perlunya pelatihan untuk tim keuangan agar memahami PSAK 45 dan menyusun laporan tahunan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Akuntabilitas, PSAK 45, Organisasi Nirlaba, Metode Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi

ABSTRACT

This research highlights the importance of transparency and accountability in financial reports of non-profit organizations (NPOs) according to PSAK number 45. The case study of DPD REI Jawa Tengah reveals that many NPOs still use simple accounting methods. The study aims to analyze and reconstruct financial statements to align with applicable accounting standards. It uses a descriptive qualitative method with primary data from observations, interviews, and documentation at DPD REI Jawa Tengah, and secondary data from literature studies. Data collection techniques include participant observation, interviews, and documentation. Data analysis involves reduction, presentation, reconstruction, and conclusion drawing, with data validity ensured through triangulation of techniques, time, and sources. In 2020, DPD REI Jawa Tengah recorded total revenue of Rp 1,178,573,359 and expenses of Rp 1,406,634,470, resulting in a deficit and a decrease in net assets. The financial position report showed total assets of Rp 315,367,861 without liabilities, while the cash flow report indicated a cash decrease of Rp 228,061,111. DPD REI Jawa Tengah still uses simple cash recording and single-entry methods and has not fully implemented PSAK 45. The

research recommends adopting an accrual-based and double-entry accounting system to enhance financial report accountability. Managerial implications include the need for training for the finance team to understand PSAK 45 and prepare more comprehensive annual reports.

Keyword: Accountability, PSAK 45, Nonprofit Organization, Accounting Methods, Accounting Information System

1. PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba (*Nonprofit Organization*, disingkat NPO) merupakan kumpulan dari beberapa individu yang memiliki visi misi tertentu untuk mencapainya bersama-sama yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Kegiatan yang dilakukan tidak berorientasi pada pengumpulan laba atau kekayaan semata tapi pada umumnya kegiatannya hampir sama dengan bisnis laba. Terdapat perbedaan mendasar antara waralaba dengan nirlaba terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas operasinya (Kristy 2017). Organisasi nirlaba tidak memiliki kepemilikan yang jelas. Sumber pendanaan untuk berjalannya suatu organisasi nirlaba didapatkan dari para iuran anggota, sumbangan anggota, donatur dari pihak luar. Contoh organisasi nirlaba yaitu tempat ibadah, yayasan, lembaga swadaya, partai politik, asosiasi profesional, serikat buruh, dan sebagainya.

Layaknya perusahaan waralaba, organisasi nirlaba juga sangat diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi nirlaba. Melalui laporan keuangan inilah sebagai bentuk pengendalian yang sangat penting bagi organisasi (Gultom and Poputra 2015). Pertanggungjawaban kinerja organisasi nirlaba yang tercatat dalam laporan keuangan diharapkan transparan dan akuntabel agar memberikan informasi akuntansi yang dapat diandalkan dan relevan bagi para pengguna (pengurus organisasi, pemberi donatur). Laporan keuangan harus disajikan dengan benar sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku, sehingga berguna dalam pengambilan keputusan yang diharapkan tepat sesuai rencana (Kristy 2017).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia telah mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba dalam satu standar, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 45. Penyajian laporan keuangan dengan standar PSAK no. 45 dibuat khusus agar pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang berbeda-beda itu dapat disusun dengan standar yang sama agar dengan harapan lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Hal ini menjadi penunjang agar laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba lebih akuntabel, transparan dan dipercaya oleh para pengguna (*user*) (Defina 2017).

Pada kenyataannya masih banyak kurangnya pengetahuan organisasi nirlaba akan siklus akuntansi PSAK 45. Tidak semua penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba sudah mengacu sesuai standar PSAK 45. Sejauh ini hanya organisasi nirlaba yang lingkungannya besar tingkat nasional yang rata-rata telah memiliki sumber daya mumpuni dan kompeten dalam menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 45 (Defina 2017). Hal yang mempengaruhi banyaknya organisasi nirlaba belum menerapkan penyusunan laporan keuangan standar PSAK 45 ialah ketidaktahuan tentang PSAK 45, minimnya sumber daya manusia yang memadai untuk membuat laporan keuangan sesuai standar PSAK 45, atau telah membuat namun belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang mengaturnya (Ariyanti and Soraya 2020).

REI (Real Estat Indonesia) adalah organisasi asosiasi perusahaan-perusahaan atas dasar kesamaan usaha, kegiatan, dan profesi di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman seperti perkotaan, perkantoran, pertokoan, *resort*, serta jasa-jasa real estat lainnya, berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional. Saat ini, REI ada di seluruh penjuru daerah di Indonesia yang diwadahi oleh Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD di 38 provinsi se-Indonesia. Dalam aktivitas usahanya, anggota REI mengembangkan berbagai jenis

produk properti mulai dari skala usaha kecil dan menengah hingga skala besar. Bersumber pada data yang dimuat dalam System Informasi Pengembang (Sikumbang) milik Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), capaian pembangunan rumah bersubsidi maupun non-subsidi yang dibangun anggota REI adalah yang terbesar atau mayoritas.

REI asosiasi besar dengan kepengurusan tingkat Nasional yang disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan tingkat daerah yang disebut Dewan Pengurus Daerah (DPD) mempunyai peraturan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berdasarkan Peraturan Organisasi REI No. 11 Tahun 1996 tentang Penatalayanan Keuangan & Harta Kekayaan REI disebutkan sekurang-sekurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, Bendahara Umum DPP / Bendahara DPD wajib melaporkan secara tertulis keadaan keuangan, mencakup rencana dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran kepada DPH (Dewan Pengurus Harian) melalui rapat DPH (REI 2002).

DPD REI Jawa Tengah merupakan pemegang & penyelenggara kepengurusan tingkat daerah yang terletak di provinsi Jawa Tengah beralamat Perumahan Semarang Indah Blok. C8 No. 12A Tawangmas, Kota Semarang. Memiliki agenda terdekat ditahun 2024 ini pada bulan Oktober akan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda). Musda dalam organisasi sendiri ialah peralihan kepengurusan lama ke kepengurusan yang baru. Pada kegiatan Musda, yang dilakukan kepengurusan lama dalam hal ini Ketua & Bendahara bertanggung jawab melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan selama 3 tahun kepengurusan beserta pengelolaan keuangan maupun kekayaan organisasi kepada anggota.

Selama ini laporan keuangan DPD REI Jawa Tengah dalam penyajian laporan keuangan hanya berupa pemasukan dan pengeluaran kas atau yang disebut dengan metode *cash basis* dan pencatatan *single entry*. Adapun pencatatan Akuntansi juga belum mengelompokkan transaksi dalam akun-akun tertentu, kriteria pengelompokkan transaksi hanya berdasarkan kriteria yang dibuat oleh asosiasi sendiri, bukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terlebih pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual juga tidak rutin dilakukan sehingga sering terjadi selisih antara saldo tercatat manual dengan saldo yang sesungguhnya terjadi pada saat penyajian laporan keuangan bulanan. Hal ini diakui oleh bendahara organisasi bahwa laporan keuangan yang dibuat masih jauh dari standar akuntansi yang berlaku. Dan diakui pula bahwa penyebab tidak terkonsepnya laporan keuangan organisasi dikarenakan belum adanya sumber daya manusia yang benar-benar memahami dan kompeten dalam bidang akuntansi.

Seringkali ketika akan adanya kegiatan asosiasi, ketua & bendahara kesulitan dalam pengambilan keputusan dikarenakan dalam pencatatan keuangan tidak dilakukan secara *up to date*, tidak konsisten dalam hal format, tata letak & penggunaan metode akuntansi menyebabkan kesulitan memahami informasi keuangan Transaksi-transaksi yang tidak tercatat dengan baik akan menciptakan keraguan tentang keandalan laporan keuangan dan beresiko salah dalam menilai kinerja asosiasi. Sehingga hal ini mempengaruhi lambatnya aliran dana asosiasi terhadap pengeluaran serta menghambat kinerja asosiasi dan kesekretariatan dalam berbagai kegiatan.

Fenomena mengenai laporan keuangan dalam sebuah Asosiasi Perusahaan Real Estat tertua di Negara Indonesia membuat peneliti tertarik menjadikan objek penelitian sebab perkembangannya yang begitu cepat di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 1975 hingga sekarang, serta menjadi cikal bakal banyak disusulnya asosiasi Real Estat lainnya. Peneliti juga sebagai partisipan pada objek penelitian ini tahu betul kesulitan yang dialami Pengurus terutama bendahara dan Sekretariat (alat kelengkapan suatu organisasi perihal pelayanan, administrasi dan keuangan) pada saat adanya agenda Musda di tahun 2024 bulan Oktober yang akan datang dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Peneliti menekankan penelitian tentang organisasi nirlaba karena minim pengawasan sehingga dalam prakteknya bentuk laporan keuangan mereka memiliki kerangka atau jenis

yang berbeda antara satu organisasi nirlaba dengan yang lain. Jika laporan tidak mengikuti standar yang ada, pembuat laporan keuangan bingung di setiap periodenya dalam mengelompokkan transaksi dan menyusun formatnya. Hal ini berdampak pada *user* dalam menilai kinerja organisasi dan sulit dalam mengambil keputusan. Kerangka konseptual ini diperlukan agar informasi keuangan dari macam transaksi mudah terbaca, terukur setiap periodenya, serta dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini yang timbul adalah (i) bagaimana perlakuan akuntansi yang sudah diterapkan di DPD REI Jawa Tengah?, (ii) bagaimanakah kesesuaian pengelolaan keuangan pada DPD REI Jawa Tengah dengan PSAK 45? Dan (iii) Bagaimana rekonstruksi penyajian laporan keuangan DPD REI Jawa Tengah sesuai dengan pedoman PSAK No. 45?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana asosiasi DPD REI Jawa Tengah mematuhi standar akuntansi yang berlaku. menilai dampak dari penerapan standart terhadap kualitas penyajian laporan keuangan serta kendala yang dihadapi asosiasi dalam mengimplementasikan PSAK 45, dan mengkaji penerapan PSAK 45 dalam laporan keuangan Asosiasi DPD REI Jawa Tengah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Kegunaan-Keputusan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*)

Teori yang mendasari penelitian ini adalah Teori Kegunaan-Keputusan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*). Teori ini dikemukakan pertama kali pada tahun 1954 dalam buku dengan judul *An Accounting Concept of Revenue* di *Universty of Chicago* Amerika Serikat oleh George J. Staubus, yang awalnya dikenal dengan nama *A Theory of Accounting to Investors*. Teori kegunaan Keputusan menjadi suatu pedoman dalam Menyusun kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat (Staubus, 2020).

Tujuan dari teori ini yaitu sebagai pengambil keputusan oleh pengguna dan memberikan jaminan bahwa informasi tersebut secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, serta memperantarai gambarannya. Teori mencakup syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna informasi akuntansi. Kegunaan dari keputusan informasi akuntansi memiliki komponen-komponen yang dapat dipertimbangkan oleh penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya (Lestari and Dewi 2020).

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut (Sari 2022), teori sinyal atau *signaling theory* merupakan teori yang membahas bagaimana manajemen keberhasilan dan kegagalan terkait sinyal-sinyal (informasi) dan akan disampaikan kepada pemilik perusahaan. Sinyal ini nantinya dapat diberikan melalui laporan keuangan perusahaan. Manajer dapat memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka telah melakukan kebijakan akuntansi yang konservatisme dan menghasilkan laba yang berkualitas.

Kebijakan akuntansi yang baik bertujuan untuk mencegah perusahaan melakukan praktik pembesaran laba & membantu para pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva secara wajar. Informasi yang diterima oleh investor bisa menjadi sinyal positif (good news) atau negatif (bad news). Sinyal positif terjadi ketika laba yang dilaporkan perusahaan meningkat, sedangkan sinyal negatif muncul ketika laba yang dilaporkan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa informasi merupakan elemen krusial bagi investor atau pelaku bisnis, karena informasi tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi masa lalu, saat ini, dan prospek masa depan perusahaan.

Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat penting bagi investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk pengambilan keputusan investasi. Teori sinyal ini dapat digunakan untuk menganalisis fluktuasi harga saham di pasar modal, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan investasi.

2.1.3. Akuntansi

A. Pengertian Akuntansi

Suatu alur tahapan mempelajari, menimbang dan menghubungkan informasi yang berisikan tentang transaksi keuangan untuk memperoleh sumber bahan yang menjadi pertimbangan dan menghasilkan keputusan yang tepat oleh yang pemakai informasi. Dapat juga diartikan sebagai suatu aktivitas pencatatan, mengklarifikasi, dan meringkas data keuangan dengan cara yang berarti (Suhendi 2017). Berdasarkan buku yang ditulis oleh (Masdiantini, Sunitha, karini, Uray 2024) Akuntansi adalah serangkaian konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan menyajikan informasi keuangan dalam suatu entitas ekonomi. Informasi yang dihasilkan melalui akuntansi sangat penting bagi berbagai pihak yang membutuhkannya, termasuk manajer perusahaan, pemilik, kreditur, pemerintah, analis keuangan, dan karyawan. Manajer perusahaan menggunakan informasi akuntansi untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial dan operasional. Investor mengharapkan informasi akuntansi untuk menilai kinerja operasional dan keuntungan (dividen) dari investasi mereka. Kreditur berkepentingan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Pemerintah membutuhkan informasi akuntansi untuk keperluan perpajakan dan regulasi. Analis keuangan menggunakan data akuntansi sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi investasi. Karyawan berharap bekerja di perusahaan yang mampu mendukung perkembangan karir dan peningkatan penghasilan mereka.

B. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah suatu alur dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari awal terjadinya transaksi yang masuk dan transaksi yang keluar, sampai pembuatan laporan keuangan dalam jangka waktu atau periode di sebut sebagai alur tahapan pencatatan pembukuan (Suhendi 2017). Siklus akuntansi merupakan tahapan penting dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Siklus ini menggambarkan alur pengolahan data dari transaksi masuk dan keluar hingga menjadi laporan keuangan. Tahapan ini memastikan bahwa semua transaksi dicatat, diolah, dan dilaporkan dengan benar, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan (Fitriana. 2021).

2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba

PSAK 45 yaitu kaidah untuk mengatur laporan keuangan dalam organisasi nirlaba (*Nonprofit organization* / NPO). Karena tidak berorientasi pada laba bukan berarti organisasi nirlaba tidak mempunyai kekayaan. Perbedaan dengan bisnis laba terletak pada cara memperoleh sumber pemasukannya misalnya dari usaha lain yang sah, sumbangan dan bantuan. Dari hal tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis (Ariyanti and Soraya 2020).

- A. Tujuan dibuat PSAK 45 agar pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang berbeda-beda dapat disusun dengan standar yang sama supaya lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, daya banding yang tinggi (O. L. A. Putri and Ayem 2021).
- B. Anggota Entitas Nirlaba: Masjid, Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Badan Amal, Asosiasi, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Partai Politik.
- C. Karakteristik:
 - Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan

pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

- Menghasilkan barang / jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
- Tidak ada kepemilikan seperti entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

D. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia 2011), Komponen PSAK 45 menetapkan 4 macam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca

Berfungsi untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur- unsur tersebut pada waktu tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.

2. Laporan Aktivitas.

Menyediakan informasi mengenai dampak transaksi terhadap proses berjalannya sebuah ekonomi dari suatu organisasi atau lembaga yang mempengaruhi sifat aset neto.

3. Laporan Arus Kas.

Berisikan informasi tentang transaksi masuk dan keluar dalam satu periode yang dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu kas aktivitas operasi, kas aktivitas investasi dan kas aktivitas pendanaan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berisi penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan tentang profil umum, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

2.1.5 Metode Pencatatan Organisasi Nirlaba

Terdapat metode pencatatan yang membedakan cara pencatatan pendapatan dan biaya dalam laporan pendapatan dan biaya organisasi nirlaba secara signifikan. Adapun metode tersebut adalah:

1. *Cash Basis* (Basis Kas)

Pengertian biaya basis kas adalah seluruh pengeluaran yang dibayar oleh organisasi nirlaba. Dengan demikian, total biaya yang dilaporkan pada suatu periode adalah total pengeluaran yang tercatat pada buku bank organisasi nirlaba. Pengertian pendapatan adalah seluruh penerimaan uang kas oleh organisasi nirlaba. Pada akhirnya, surplus atau defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Bila digunakan basis kas, dapat diketahui secara cepat dengan menghitung berapa saldo kas yang ada pada akhir periode.

2. *Accrual Basis* (Basis Akrual)

Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan biaya organisasi nirlaba pada suatu periode. Apa yang seharusnya menjadi pendapatan organisasi nirlaba adalah semua pendapatan yang telah menjadi hak organisasi nirlaba terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak.

2.1.6 Sistem Pencatatan

1. *Single Entry*

Merupakan sistem pencatatan tunggal dimana penjurnalan hanya terjadi sekali dan tidak ada buku besar. *Single entry* hanya mencatat daftar transaksi yang mempengaruhi kas, penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar (Defina 2017).

2. *Double Entry*

Merupakan sistem pencatatan ganda yang berarti melibatkan setidaknya dua akun. Bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu lagi disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry* sering disebut dengan istilah menjurnal (Ulfah 2019).

2.1.7 Organisasi Perusahaan

- A. Berdasarkan (Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 1987) pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat e dan f menyebutkan:
- e. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu;
 - f. Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi Perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.
- B. Pengertian Secara Umum:
- Organisasi perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha serta tujuan, aspirasi, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
 - Organisasi perusahaan mencakup susunan staf dan alokasi tugas dan tanggung jawab dalam mengolah data, memasok informasi untuk pembuatan keputusan dan merawat aktiva.

2.1.8 Proses Pengorganisasian Perusahaan

Dalam perusahaan, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi perusahaan karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan sesuai rencana. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan (Syukran 2022).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait penerapan PSAK 45, telah dilakukan di beberapa organisasi nirlaba yang berada di naungan pemerintah seperti Lembaga pendidikan ataupun organisasi nirlaba non pemerintah. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang mengacu PSAK 45, mendapatkan hasil yang dapat memuaskan para stakeholder dan dapat memberikan pertanggungjawaban mengenai kegiatan selama satu periode yang telah dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu:

1. Andreas Seran Atok, Munawar Herni Sunarya (2018)

Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan PSAK No 45 Terhadap Laporan Keuangan Entitas (Studi Kasus Pada LSM Bengkel APPEK NTT Tahun 2016-2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian, LSM Bengkel APPEK NTT

dalam penyajian laporan keuangannya sudah menerapkan PSAK 45 tentang pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas. Namun masih ada kekurangan dalam laporan keuangan Bengkel APPEK yaitu tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan. Didalam laporan aktivitas LSM Bengkel APPEK NTT terbagi menjadi tiga bentuk yaitu: Laporan Aktivitas-Tidak Terikat, Terikat Sementara dan Terikat Permanen. Melihat dari laporan aktivitas yang disajikan Bengkel APPEK NTT belum sepenuhnya dengan laporan keuangan yang disajikan PSAK 45 namun mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan informasi keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan lembaga. Laporan aktivitas Bengkel APPEK dalam penyajian dan komponen laporan keuangannya seperti: Penerimaan (pendapatan, penghasilan, aktiva bersih yang berakhir batasannya dan penerimaan lainnya), pengeluaran (biaya administrasi dan umum, biaya program, biaya pencarian dana dan biaya lainnya) serta aktiva bersih (surplus/deficit aktiva bersih periode kini). LSM Bengkel APPEK NTT dalam penyajian laporan keuangannya masih menggunakan istilah Aktiva, Kewajiban dan Aktiva Bersih.

2. Christin Dwi Novitasari, Yulinartati, Dania Puspitasari (2018)

Penelitian ini berjudul Penerapan PSAK No.45 pada Laporan Keuangan Lembaga Masjid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Didalam penelitian ini menghasilkan sebagai berikut, Laporan keuangan masjid disajikan sangat sederhana, dengan pemasukan & pengeluaran. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti memperlihatkan bahwa penyajian informasi keuangan masjid sebagai bentuk akuntabilitas & transparansi telah dilakukan dengan dua cara yaitu: Diumumkan setiap minggu saat pelaksanaan sholat jum'at dan ditempel pada papan informasi Masjid Roudhotul Muchlisin; Setelah menganalisis laporan keuangan yang dilakukan pengurus masjid Roudhotul Muchlisin tidak sesuai dengan standar keuangan PSAK No.45. Karena sangat sederhana yaitu bentuknya yang masih menggunakan metode accrual basic dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran.

3. Amalia Virgi Effendy, Norita Citra Y, Gardina Aulin Nuha (2019)

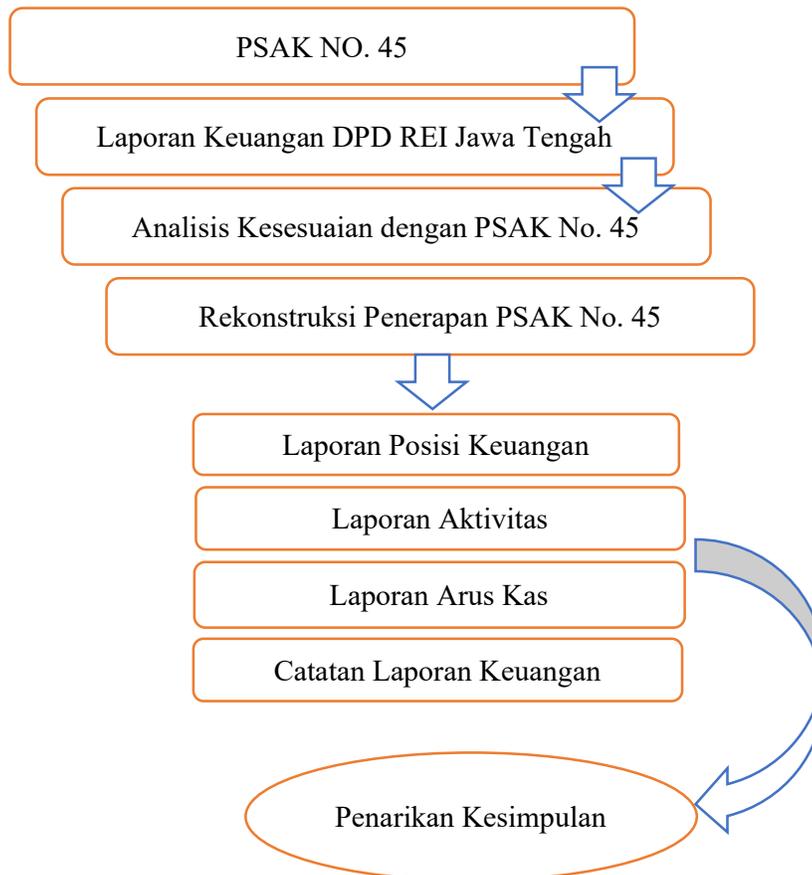
Berjudul Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pada LKSA Panti Asuhan Nurul Husna Patrang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKSA Panti Asuhan Nurul Husna Patrang belum menerapkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada laporan keuangannya, laporan yang disusun oleh lembaga yaitu laporan pengasuhan dan pembangunan yang hanya mencatat pemasukkan maupun pengeluaran kas pada transaksi yang terjadi. Pencatatan laporan keuangan pengasuhan pada lembaga yang hanya berkaitan dengan transaksi atau aktivitas pengasuhan baik berupa penerimaan kas maupun pengeluaran kas dan penyusunan laporan keuangan tersebut disusun oleh khusus bendahara 1 bagian pengasuhan, sedangkan pencatatan laporan keuangan pembangunan mencatat segala aktivitas atau transaksi yang hanya berkaitan dengan pembangunan baik berupa penerimaan maupun pengeluaran kas yang disusun oleh bendahara 2 bagian pembangunan. Penyusun laporan keuangan antara pengasuhan dan pembangunan berbeda, untuk laporan pengasuhan disusun oleh bendahara 1 bagian pengasuhan dan laporan pembangunan disusun oleh bendahara 2 bagian pembangunan. Selanjutnya pada setiap akhir bulan, dari masing-masing bendahara melaporkan hasil laporan keuangan lembaga kepada bendahara umum lembaga. Segala bentuk penerimaan kas dari donatur baik melalui secara langsung maupun transfer tidak langsung diberikan pada bendahara umum, tetapi kas tersebut masih berada ditangan bendahara baik bendahara pengasuhan maupun pembangunan. Hal tersebut karena untuk mengklaim jika ada keperluan mendesak atau dadakan. Apabila melihat kondisi dari laporan keuangan yang disusun oleh LKSA Panti Asuhan Nurul Husna Patrang, lembaga sangatlah memerlukan suatu penyusunan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar pelaporan

keuangan.

Dari ketiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa PSAK 45 merupakan standart yang tepat untuk dapat diterapkan dalam organisasi nirlaba dan berguna untuk menunjang adanya akuntabilitas dan transparasi yang masih dianggap saat ini sangat minim terutama di Indonesia. Hasil dari ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi yang telah menerapkan PSAK 45 dianggap mampu untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada para penggunanya. Organisasi yang telah menerapkan PSAK 45 dapat menggambarkan kondisi pada organisasi nirlaba agar mendapatkan laporan yang lebih terstruktur dan dapat memberikan kepuasan bagi pengguna laporan keuangan.

2.3. Kerangka Pikir

Peneliti menyusun rencana penelitian dengan cara berpedoman dengan PSAK 45, lalu mencari tahu kendala yang dihadapi pada proses pembuatan laporan keuangan DPD REI Jawa Tengah beserta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, untuk selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian dengan PSAK No. 45. Kemudian menilai dari hasil analisis dilakukannya rekontruksi data untuk dijadikan kesimpulan pada hasil akhir penelitian.



3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif cenderung menggunakan analisis. Metode kualitatif adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Penelitian ini

mempunyai tujuan untuk mencari tahu suatu fakta, keadaan, fenomena yang terjadi pada objek penelitian (Nurmala dkk, 2021).

Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah studi kasus, dan desain atau konstruksi penelitian yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti di berbagai bidang dengan menganalisis kasus secara mendalam disebut studi kasus. Kumpulkan informasi yang lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data pada waktu yang sudah ditentukan. Kasus ini dapat berupa peristiwa, tugas, proses dan program menurut Creswell (2016). Metode studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini dipilih karena sesuai dengan penelitian ini, yang berupaya untuk menganalisis serta mengkaji laporan keuangan.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada organisasi nirlaba yaitu DPD REI Jawa Tengah yang beralamat di Perumahan Semarang Indah Blok. C8 No. 12A Tawangmas, Semarang.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

1. Jenis Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur dan pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dengan cara terjun langsung ke DPD REI Jawa Tengah melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

2. Jenis Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dihasilkan dari sumber-sumber lain sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini, peneliti mengambil data dari studi kepustakaan dengan mempelajari serta memahami buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Data ini diperoleh dari buku saku REI, skripsi terdahulu, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan dari judul penelitian.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Partisipan (*Participant Observation*)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan kerja di DPD REI Jawa Tengah. Observasi partisipan yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam kategori Partisipasi Aktif, di mana peneliti mengikuti apa yang dilakukan narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap (Sugiyono 2010). Peneliti bekerja sebagai administrasi dan *support finance* di Asosiasi DPD REI Jawa Tengah.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk menindak lanjuti dalam menemukan sebuah data. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama yaitu Bendahara, Wakil Bendahara, Sekretaris Executive, Sekretariat bagian keuangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah, cerita, biografi), gambar (foto, gambar hidup, sketsa), atau karya seni dari seseorang (Sudarsono 2017). Bertujuan untuk mendapatkan informasi data tertulis berupa berkas pencatatan transaksi masuk dan transaksi keluar, atau laporan keuangan yang berhubungan dengan penelitian ini dapat berupa foto, berkas salinan, maupun beberapa gambar.

3.4 Metode Analisis Data

Adapun dalam proses analisis data penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan sumber informasi yang di berikan oleh organisasi. Aktifitas yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi sama artinya dengan menyaring, memilih hal-hal yang pokok, hanya fokus pada data penting yang memiliki sumber valid untuk menunjang penelitian membuang yang tidak perlu (Rijali 2018).

2. Penyajian Data

Setelah data di rangkum kemudian disajikan. Penyajian data dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Rijali 2018).

3. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (E. & E. W. Putri 2019)

4. Kesimpulan Data

Kesimpulan di tarik dari hasil dan pembahasan berdasarkan ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Dengan adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan akan berkualitas (Rijali 2018).

3.5 Keabsahan Data

Untuk memperkuat penelitian dalam hal teori, metodologi, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif (Mekarisce 2020). Berikut tiga macam teknik triangulasi yang digunakan:

1. Triangulasi Teknik

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber penelitian yang sama. Peneliti akan menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Triangulasi Waktu

Waktu juga memengaruhi kredibilitas data. Mewawancarai pada waktu yang tepat akan menghasilkan data lebih berkualitas dan potensi data lebih kredibel.

3. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, untuk mengui kredibilitas data. Data yang telah diterima dari banyak sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan digolongkan.